

A. SWOT Indonesia Dalam Kerjasama IJEPA

Jika pada bab II (dua) telah sedikit banyak disinggung tentang permulaan perdagangan bebas melalui mekanisme GAAT (*General Agreement on Tariffs and Trade*, 1948-1994) dan WTO (*World Trade Organization* 1 Januari 1995) dan pelaksanaannya dalam bentuk multilateral, regional, maupun bilateral. Maka pada bab III (tiga) ini, pembahannya akan lebih spesifik, yaitu mengenai *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Treats* (ancaman) atau disingkat "SWOT" Indonesia dalam forum kerjasama dan perdagangan bebas IJEPA dan ACFTA. Untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian strategi melalui kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap dua kerjasama tersebut, yang akan dianalisis berdasarkan SWOT dari masing-masing forum kerja sama, dan akan menjadi bahasan pada bab IV (empat).

Dalam analisis SWOT Indonesia dengan Jepang melalui forum kerjasama Indonesia-Jepang *Economic Partnership Agreement* atau IJEPA, terdapat berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai daya tawar maupun sebagai daya saing kepada Jepang. Namun hal tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut, karena untuk menangkap peluang dari kerjasama IJEPA bukan hanya berbicara tentang potensi yang dimiliki oleh Indonesia saja, tetapi juga tentang strategi yang diterapkan Jepang sebagai salah satu di antara

1. *Strengths* (kekuatan)

a) **SDA Melimpah dan SDM Murah**

Sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia merupakan *entry point* bagi negara-negara di dunia untuk bekerjasama dengan Indonesia terutama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas. Pasalnya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang cenderung murah. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain, kekayaan hutan, lautan, dan barang-barang tambang maupun produk turunan lainnya. Berbagai potensi tersebut tersebar di enam pulau besar di Indonesia, yaitu *pertama*, pulau Sumatera, *kedua*, Jawa, *ketiga*, Kalimantan, *keempat* Sulawesi, *kelima* Papua, *keenam* Nusa Tenggara dan Maluku.¹⁸

***Pertama*, Sumber Daya Alam di Sumatera, yaitu :**

1. Minyak Bumi. Potensi minyak bumi di Sumatera Selatan mempunyai cadangan 5.034.082 MSTB Produksi eksploitasi pertamina dan mitranya selama 1998-2002 baru rata-rata 3.718.720 barrel perhari.
2. Gas Alam. Cadangan gas alam yang ditemukan di kabupaten Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas dan Ogan Komering Ilir mencapai 7.238 BSCF. Produksi eksploitasi 4 tahun terakhir baru rata-rata

2.247.124 MMSCF. Gas alam ini dapat dijadikan bahan pembangkit tenaga listrik, produk plastik dan pupuk.

3. Batu Bara. Cadangan batubara di Sumatera Selatan 18,13 milyar ton. Lokasi batubara terdapat di kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Mutu cadangan batubara pada umumnya berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 Kcal/kg. Cadangan batu bara tersebut baru di kelola oleh PT. Bukit Asam dan PT. Bukit Kendi pada lokasi Kabupaten Muara Enim. Sedangkan cadangan sebanyak 13, 07 miliyar ton belum di kelola sama sekali.
4. Pembangkit Tenaga Listrik. Daya tampung saat ini 411,975 KW. Saat ini PLN masih defisit ;lebih kurang ; 90 Mega Watts. Kebutuhan setiap tahun meningkat. Diprediksi tahun 2012 defisit PLN di Sumatera Selatan akan mencapai 291,91 Mega Watts.

Kedua, Sumber Daya Alam di Jawa

Di Jawa memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Di Jawa Timur sendiri memiliki luas lahan sawah adalah 1.178.283 ha, terdiri dari lahan beririgasi seluas 907.274 ha, sawah tadah hujan seluas 243.899 ha, dan sawah lainnya/irigasi desa seluas 27.110 ha. Luas lahan palawija, hortikultura dan sayur mayur seluas 4.046.971 ha(*sumber :*

Indonesia Tanah Airku (2007)). Ini saja baru Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat juga memiliki lahan pertanian yang luas dan

produktif. Di Wilayah pinggiran pun, juga sangat potensial di bidang perikanan. Selain itu, di sektor perikanan Jawa Barat, komoditas unggulan adalah ikan mas, nila, bandeng, lele, udangwindu, kerang hijau, gurame, patin, rumput laut dan udang vaname. Di tahun 2006 saja, provinsi ini memanen 560,000 ton ikan hasil budidaya perikanan dan payau, atau 63,63% dari total produksi perikanan Jawa Barat.

Ketiga, Sumber Daya Alam di Kalimantan

Di Provinsi Kalimantan Timur, memiliki hasil utama potensi alam berupa hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara. Di sektor lain yang saat ini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan. Potensi-potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur tersebut sebagian masih bersifat indikatif (belum terdeteksi) dan sebagian sudah terdeteksi. Dan Potensi yang sudah terdeteksi antara lain; emas sebanyak 176 ton di Kutai Barat, batu gamping 654 ribu ton di Malinau, 25 ribu ton di Nunukan, 12,32 juta ton di Kutai Barat, batu bara sebanyak 13,46 juta ton di Kutai Barat, sirtu sebanyak 2,50 juta ton Nunukan, 6,01 juta ton di Kutai Barat, pasir kuarsa sebanyak 1 milyar ton di Nunukan.

Selain itu, di Kalimantan sumber daya alam yang sangat luas adalah hutan. Berdasarkan padu serasi tahun 1999, luas kawasan hutan di kawasan perbatasan adalah 8.763.726 ha, yang terdiri dari (KBNK)

seluas 1.707.180 ha, KPK seluas 4.133.104 ha, Kawasan lindung

seluas 2.917.860 ha. Bila dibandingkan dengan luas hutan di Kalimantan Timur seluas 20.039.500 ha, maka 43,73 % luas hutan berada pada wilayah perbatasan. Selain itu, terdapat pula kekayaan flora dan fauna serta hasil hutan ikutan lainnya yang juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti damar, gaharu, sarang burung, rotan dan lain-lain.

Keempat, Sumber Daya Alam di Sulawesi

Di provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah agraris. Dilihat dari sektor pertanian yang dihasilkan berupa kelapa, cengkih, pala, kopi, vanilla. Dan dari sub-sektor perikanan dihasilkan tuna, cakalang, kerapu, rumput laut dan lain-lain. Selain itu, di samping produk sektor pertanian yang diusahakan oleh masyarakat pertanian Sulawesi Utara juga memiliki sumber daya alam pertambangan dan pariwisata yang menunggu untuk dikelola oleh para investor.

Kelima, Sumber Daya Alam di Papua

Di Papua memang kaya akan hasil tambangnya, berupa tembaga, emas, minyak dan gas. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport. Di samping itu, masih terdapat beberapa potensi tambang lain seperti batu bara berjumlah 6,3 juta ton, barn

perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun. Adapun distribusi penduduk Indonesia sebagai berikut:¹⁹

Tabel. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Nama Pulau	Persentase
Jawa	58%
Sumatera	21%
Sulawesi	7%
Kalimantan	6%
Bali dan Nusa Tenggara	6%
Papua dan Maluku	3%

Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk mengembangkan industrinya di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak dan murah. Sumber daya manusia di Indonesia dapat di berikan upah/gaji dibawah standar²⁰. Dibanding sumber daya manusia di negara maju Indonesia merupakan pasar SDM yang murah, sehingga dapat mengurangi biaya produksi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

Sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang cenderung murah ini merupakan keuntungan sebagai daya tawar untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. EPA dengan Jepang merupakan kerjasama ekonomi yang memberikan peluang

¹⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_Penduduk_Indonesia_2010. Terakhir diakses pada 25 Juni 2013 pukul 12.08 WIB.

²⁰Upah minimum bulanan pekerja Indonesia sebesar US\$ 88,36 setara Rp 858,9 ribu dan tertingginya US\$ 161,33 setara Rp 1,57 juta. Lihat daftar peringkat upah buruh Asia dan

bagi Indonesia, karena barang yang akan masuk dalam perjanjian ini bukan barang pesaing. Indonesia memberikan komoditas hasil alam untuk dapat masuk di pasar Jepang. Sedangkan Jepang sangat memerlukan produk-produk hasil alam Indonesia (ekspor migas) untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan menjaga daya saing di pasar global.²¹

Dengan ke dua faktor pendorong tersebut, yakni SDA dan SDM, semakin meyakinkan perusahaan Jepang di berbagai sektor industri terutama dibidang otomotif dan elektronik baik yang sudah ada di Indonesia maupun yang belum untuk melakukan investasi dan mengembangkan perusahaannya di Indonesia, karena ke dua faktor tersebut memiliki efisiensi anggaran untuk melakukan proses produksi.

b) Pasar Potensial Bagi Produk-produk Jepang

Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk ekspor Jepang. Produk ekspor Jepang yang sangat potensial di Indonesia adalah produk otomotif dan elektronik. Produk otomotif Jepang seperti sepeda motor dengan merk Honda, Yamaha, menempati posisi paling atas di pasar Indonesia. Peringkat ini diraih oleh produk Jepang karena kualitas barang yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa produk Jepang sangat diminati oleh pasar Indonesia. Dengan menguasai hampir separuh pangsa pasar otomotif dan elektronik Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk Jepang. Dalam skema EPA dengan

melakukan negosiasi memperbaiki mutu kualitas produk ekspor Indonesia.

c) Banyaknya UMKM

Jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau UKM (Usaha Kecil Menengah) yang merupakan 99,9 persen dari pelaku usaha di Indonesia, menjadikan UMKM sebagai wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. UMKM juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 97,2 persen total tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2011. Kontribusi UMKM dalam perekonomian tahun 2010 juga cukup besar, seperti yang ditunjukkan oleh sumbangan UMKM pada pembentukan PDB (57,8 persen), nilai ekspor non migas (15,8 persen), dan pembentukan modal tetap atau investasi (48,3 persen). Kontribusi yang besar tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan tenaga kerja UMKM sebesar 3,4 persen, PDB sebesar 5,6 persen, nilai ekspor non migas sebesar 8,4 persen, dan investasi sebesar 6,1 persen pada tahun 2009-2010.²²

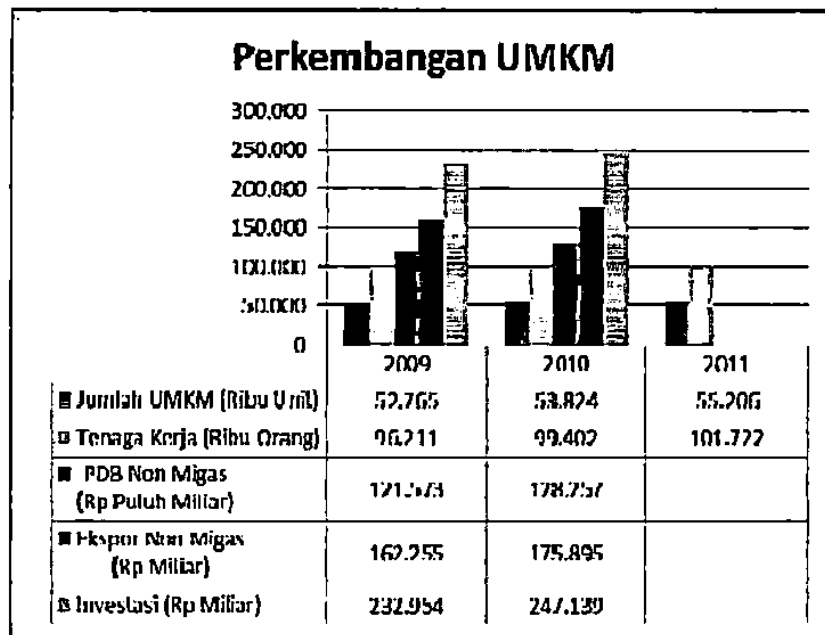
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia Syarif Hasan memperkirakan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia pada 2013 mencapai dua juta UMKM. Jumlah UMKM saat ini menurutnya baru mencapai 55,2 juta yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kontribusi ke

²² <http://www.bappenas.go.id/node/72/3628/warta-kumkm-edisi-i-semester-1---2012/>. Terakhir diakses pada 26 Juni 2013 pukul 09.47 WIB.

pertumbuhan ekonomi dalam negeri mencapai 60 persen.²³

Perkembangan UMKM dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 1. Perkembangan UMKM



Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2012)

Dari data tersebut di atas, Indonesia memiliki banyak sekali UMKM yang berkembang dan telah menjadi pilar perekonomian. Peran usaha mikro, kecil dan menengah yang sangat besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja.

Meskipun demikian, UKM-UKM yang ada di Indonesia sampai saat ini mengalami kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya. Jepang akan meningkatkan investasinya sebesar dua kali lipat setelah disahkannya EPA dengan Indonesia. Investasi yang besar

akan memberikan kesempatan UKM untuk mengembangkan usahanya. Kesulitan modal bagi UKM akan teratasi dengan investasi dalam kerangka EPA yang dilakukan Jepang, karena hal tersebut merupakan lahan bisnis yang tidak boleh dilewatkan.²⁴

2. Weaknesses (kelemahan)

a) Rendahnya Kualitas SDM

Menurut salah satu terbitan PBB yaitu *Human Development Report* 2001 Indonesia berada pada urutan ke 102 dari 162 negara dalam pembangunan manusia; jauh di bawah Malaysia yang berada pada urutan ke-56, Sri Lanka pada urutan ke 81, dan Filipina pada urutan ke-70.²⁵ Selain itu, dari lebih 250 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini setengahnya termasuk usia kerja. Dari penduduk usia kerja tersebut hanya 66 persen yang bekerja. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut hanya 4 persen yang memiliki pendidikan di atas SLTA (Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana). Bagian terbesar dari penduduk usia kerja adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).²⁶

Sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak mengalami hambatan. EPA dengan Jepang telah memberi peluang yang besar bagi lalulintas jasa dari Indonesia ke Jepang terutama dibidang

²⁴*Op Cit.*, Strategi Indonesia, Hlm. 69-70. (Diolah)

ketenagakerjaan. Namun, pembukaan lapangan pekerjaan oleh Jepang dalam skema EPA akan menjadi sia-sia, karena SDM Indonesia tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengisi posisi yang di tawarkan. Hal tersebut, disebabkan oleh standar kualitas tenaga kerja yang akan diterima oleh Jepang sangat tinggi, terutama sebagai *nurse* dan *caregiver*. Setiap perawat yang akan masuk ke Jepang dalam skema EPA akan menanggung biaya standarisasi dan akreditasi melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hal ini menjadi tantangan yang serius, meskipun perdagangan TKI bebas pajak, akan tetapi biaya perbaikan mutu sumber daya manusianya lebih besar.²⁷

b) Rendahnya Kualitas UMKM

Banyaknya UMKM atau UKM di Indonesia, merupakan potensi untuk meningkatkan perekonomian nasional, karena UKM telah menjadi pilar penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hasil penelitian sejumlah pakar ekonomi global, bahwa UKM sudah terbukti mampu memperkuat dan menjaga perekonomian suatu negara terutama saat diterpa krisis ekonomi.

Setidaknya ada 2 (dua) kesimpulan yang dapat di cermati sebagai penguat hipotesis tentang peranan sektor UKM, yakni *pertama*, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, sebagai contoh terjadi di

Jepang yang telah lepas dari kontribusi sangat besar dari sektor usaha

kecil menengah. *Kedua*, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat (AS) sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan (DL Birch, 1979).²⁸

Di Indonesia, perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Pada tahun 2003, persentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha menengah sebanyak 62,0 ribu unit usaha dan jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. UMKM telah menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2004 jumlah UMKM diperkirakan telah melampaui 44 juta unit. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen per tahunnya dari posisi tahun 2000. Kontribusi UMKM dalam PDB pada tahun 2003 adalah sebesar 56,7 persen dari total PDB nasional, naik dari 54,5 persen pada tahun 2000. Sementara itu pada tahun 2003, jumlah koperasi sebanyak 123 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 27.283 ribu orang, atau meningkat masing-masing 11,8 persen dan 15,4 persen dari akhir tahun 2001.

Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi oleh meratanya peningkatan kualitas UMKM.

Permasalahan klasik yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan oleh masalah internal yang dihadapi UMKM yaitu: rendahnya kualitas SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah besarnya biaya transaksi akibat iklim usaha yang kurang mendukung dan kelangkaan bahan baku. Juga yang menyangkut perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan.

c) Rendahnya Kualitas Barang Ekspor

Kesepakatan EPA perlu dikelola dengan baik untuk menangkap peluang secara maksimal. Begitu juga dengan barang atau komoditas yang diekspor ke Jepang harus di *design* agar lolos verifikasi pasar Jepang. Namun kebanyakan produk ekspor Indonesia ke Jepang memiliki kualitas yang rendah selain kendala hambatan non-tarif (kesehatan konsumen) yang diberlakukan Jepang terlalu ketat. Mutu produk yang rendah ini mengakibatkan terhambatnya produk ekspor

Terhambatnya ekspor kopi robusta Indonesia ke Jepang, dipengaruhi oleh rendahnya ambang batas residu pestisida sebesar 0,01% karbaril yang diterapkan sejak 2009. Padahal negara-negara di Eropa menerapkan ambang batas residu pestisida karbaril hanya sebesar 0,1%. Hambatan non-tarif yang dilakukan Jepang tersebut, telah membuat ekspor kopi robusta ke Jepang menjadi terhambat hingga US\$1,35 juta per tahun. Setiap tahunnya, kopi robusta yang ditolak masuk ke wilayah Jepang kendati sudah berada di pelabuhan negara itu bisa mencapai 20-30 kontainer dengan nilai sekitar US\$45.000 per kontainer.

Demikian pula dengan ekspor Udang ke Jepang. Negara Sakura itu begitu ketat menerapkan standar mutu terhadap produk udang impor. Akibatnya, menurut Johan Suryadarma, Ketua Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia (APCI), sepanjang 2007 sekitar 50 kontainer produk perikanan asal Indonesia ditolak, terutama udang, karena terdeteksi mengandung residu antibiotik (*chloramphenicol*²⁹).³⁰

Hal ini menjadi hambatan yang sangat signifikan terhadap kemajuan ekspor Indonesia ke Jepang. Selain tidak dapat masuk ke pasar Jepang daya saing terhadap produk dari negara lain menjadi menurun.

²⁹ Antibiotik *chloramphenicol* biasa digunakan untuk menanggulangi infeksi bakteri anaerobik, seperti *aeromonas*, *pseudomonas*, *mycoplasma*, dan *enterobacteriaceae*. *Chloramphenicol* punya efek membunuh mikroorganisme dalam pakan sehingga pakan menjadi lebih awet, serta mampu memperbaiki sistem pencernaan hewan supaya lebih efisien dan nafsu makan ikan atau udang meningkat.

³⁰ *http://www.kompas.com/online/nasional/ekonomi/04/06/07/04060712287.html* (diakses pada 26 Juni 2012)

Sehingga akan menyebabkan pelaku ekspor mengalami kerugian yang besar karena produknya tidak laku di pasar dan pendapatan pemerintah dari pajak pun akan berkurang.

d) UU Investasi Berbelit

Sebenarnya Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan investasi *riil* di Indonesia. Terakhir adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 2008 2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Paket ini memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, yakni kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian.³¹ Selain itu, hadirnya UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007 adalah bukti respon positif pemerintah terhadap arus penanaman modal (investasi) baik oleh investor dalam negeri maupun asing.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai perangkat lunak melalui berbagai kebijakan seperti tersebut di atas, ada beberapa kendala yang menyebabkan peralihan investasi oleh para investor di negara maju (Jepang), diantaranya :Ekonomi biaya tinggi (efisiensi), Kepastian usaha/hukum, Harmonisasi peraturan, Kelembagaan (fasilitas, pelayanan & promosi), Distribusi, Kepabeanan, dan

³¹ <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3090-22082008.pdf>.
Terakhir diakses pada 26 Juni 2012 pukul 15.15 WIB

Perpajakan. Kendala tersebut berkaitan dengan kordinasi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Telah terjadi disharmoni antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan Presiden tidak bisa berjalan efektif (tumpang-tindih), karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah.³²

Selain itu, para investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, termasuk di dalam isi pasal 11 UU No 22 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah. Atau dengan kata lain sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha dilakukan oleh BKPM(pemerintah pusat) dan BKPM (pemerintah daerah). Namun setelah berlakunya otonomi daerah, terjadi ketidakjelasan mengenai

tarik menarik antara kegiatan BKPM dengan BKPM serta instansi-instansi pemerintah daerahlainnya yang menangani kegiatan investasi.

Menurut kalangan pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam *US Chamber of Commerce* (USCC/Kadin Amerika Serikat) C. Bartlett, Presiden USCC untuk Indonesia menilai, daya tarik Indonesia bagi masuknya investasi asing masih kalah dibandingkan dengan Vietnam, dalam hal promosi potensi negara dan fasilitas yang ditawarkan bagi investor asing. Pemerintah negara lain di ASEAN dinilai sangat agresif dalam memasarkan negaranya sebagai tujuan investasi. Di sisi lain, dia berpendapat daftar negatif investasi di Indonesia terlalu panjang jika dibandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan dalam paket kebijakan investasi.³³

3. *Opportunities* (peluang)

a) Penurunan Tarif BM

Penurunan dan penghapusan tarif bea masuk (BM) terhadap produk ekspor Indonesia ke Jepang sampai 0 persen merupakan kesepakatan yang disepakati dalam EPA Jepang-Indonesia. Dengan tarif bea masuk sampai 0 persen akan memberikan kemudahan pada produk Indonesia untuk masuk dan bersaing di pasar Jepang. Jepang menawarkan 0 persen terhadap 50 jenis komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia. Lima puluh jenis komoditas pertanian

Indonesia yang akan diberikan bebas tarif di Jepang termasuk pisang, jambu, salak, dan mangga.

Economic Partnership Agreement Indonesia-Jepang akan memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia karena peluang produk Indonesia untuk masuk pasar Jepang akan lebih besar. Salah satu produk ekspor Indonesia ke Jepang yang meningkat setelah disepakatinya EPA Indonesia-Jepang adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, ekspor ke Jepang pada tahun 2011 meningkat 70 persen dibandingkan 2010. Pada tahun 2012 lalu, ekspor ke Jepang meningkat 40 persen. Menurutnya, kenaikan ekspor tekstil ini didukung oleh bea masuk ke Jepang nol persen. Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang yang berdampak pada pembebasan bea masuk tekstil kesana.³⁴

b) Peningkatan Akses Pasar

Kesepakatan liberalisasi pasar barang oleh Jepang mencakup lebih dari 90 persen barang ekspor Indonesia ke Jepang. Termasuk produk industri dan agri-bisnis. Pemerintah menginginkan selain produk yang sudah masuk ke Jepang seperti kayu, udang, karet, mineral, mebel, dan kertas, mereka juga menurunkan tarif tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sekarang (sebelum disahkannya EPA Jepang-Indonesia) berkisar 7-11

persen, agar penetrasi pasar TPT Indonesia semakin meningkat. Indonesia membidik TPT sebagai salah satu komoditas unggulan untuk meraih peluang yang lebih besar, karena selama ini pasar TPT impor Jepang dikuasai oleh China. Dengan EPA dan kesepakatan penurunan tarif bea masuk untuk TPT, maka TPT Indonesia menjadi prioritas pasar Jepang daripada China dan Vietnam, yang belum terjajaki EPA.

Melalui pelebaran akses pasar tersebut, saat ini sudah ada beberapa produk unggulan ekspor Indonesia di pasar Jepang. Misalnya, tekstil dan produk tekstil, kayu lapis (*plywood*), produk perikanan, dan produk minyak dan gas bumi. Dari data Bea Cukai Jepang yang diolah oleh Kedutaan Besar RI di Tokyo, nilai impor Jepang dari Indonesia mencapai 18,67 miliar dollar AS tahun 2005 atau 4,10 persen dari total impor Jepang dari dunia sebesar 455,29 miliar dollar AS. Produk Indonesia menjadi pemasok kedua produk udang ke Jepang dengan volume ekspor sebesar 48.628 metrik ton setelah Vietnam dengan volume ekspor sebanyak 55.505 metrik ton. EPA akan memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia yaitu peningkatan volume perdagangan bagi produk Indonesia ke Jepang.³⁵

c) Pembukaan Lapangan Pekerjaan

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang semakin memburuk membutuhkan penanganan yang menyeluruh serta berkesinambungan.

berkembang serta meningkatkan taraf hidupnya terutama dalam mengelola peluang kerja dalam skema EPA yang menjanjikan bidang konstruksi dan kesehatan untuk tenaga kerja Indonesia.

Sekurang-kurangnya ada tiga manfaat atau peluang yang akan diperoleh Indonesia dalam kesepakatan EPA dibidang jasa, diantaranya :

Pertama, komitmen liberal Jepang untuk jasa tenaga kerja Indonesia (*mode for movement of natural persons*) telah mendorong pengiriman tenaga kerja terampil; seperti juru rawat (*nurse*) dan perawat orang tua (*caragivers*).

Kedua, dengan disepakatinya *Memorandum Of Understanding* (MOU) oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumbuh Hidayat dan Managing Director The Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) Takashi Tsunoda menandatangani nota kesepahaman di Jakarta dan juga amandemen MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan (IMM) pada tanggal 6 september 2008, telah menjamin pengiriman tenaga kerja kedua negara sehingga meminimalisir hal-hal yang bersifat merugikan terutama dibidang pengiriman tenaga kerja. Dengan penandatanganan MOU dan

dengan penguasaan bahasa dan budaya Jepang. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja wisata dan perhotelan berbasis bahasa Jepang di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

d) Terbukanya Transfer Teknologi

Pada dasarnya, sekarang ini Indonesia sedang menjalankan proses transfer teknologi dari beberapa negara maju terutama dengan Jepang(IJEPA) melalui program MIDEK (*Manufacturing Industrial Development Center*).MIDEK merupakan kerjasama teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri nasionalmelalui *training, training for trainers*, pengiriman tenaga ahli, kunjungan kerja ke industri-industri, *basic study*, dan *workshop/seminar*.Dalam program tersebut, Jepang melakukan transfer ilmu (teknologi) kepada Indonesia dan pendanaan kegiatan untuk 13 sektor industri.Secara teknis, proses alih teknologi ini dilakukan melalui hubungan investasi, perdagangan, dan kerjasama ekonomi, dan sejauh mana proses alih teknologi ini berlangsung tergantung sejauh mana kedua belah pihak memanfaatkan hubungan yang ada secara berdaya guna maksimal.³⁷

Kerjasama MIDEK mencakup dua kegiatan besar, yaitu kegiatan bersifat *cross sectoral*(sektor silang) yang terdiri dari 6 sektor dan sektor spesifik yang terdiri dari tujuh sektor. Sektor-sektor yang tergabung dalam *cross sectoral* adalahindustri logam, pengelasan, konservasi energi, percetakan dan pewarnaan, promosi ekspor dan investasi, serta usaha kecil

³⁷Op Cit., Politik Teknologi, Hlm. 70.

menengah (UKM). Adapun tujuh sektor spesifik terdiri atas otomotif, elektronik, baja, tekstil, non-besi, kimia, serta industri makanan dan minuman.³⁸

Saat ini teknologi yang digunakan dalam produksi di Indonesia masih jauh tertinggal dengan Jepang. Dengan teknologi yang digunakan sekarang, Indonesia tidak dapat memenuhi kualitas dan kuantitas pasar Jepang. Dengan demikian, transfer teknologi melalui program MIDEK harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, karena penguatan industri dalam negeri sangat bergantung pada program tersebut, terutama dalam *driver sectors*, yakni otomotif, elektronika, alat berat dan energi. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, aktivitas 13 sektor MIDEK tersebut dalam bentuk *training, training for trainers*, pengiriman tenaga ahli, kunjungan kerja ke industri-industri, *basic study*, dan *workshop/ seminar* hingga 4 tahun implementasi IJEPA berjumlah 84 kegiatan, dan hal tersebut telah mendorong proses alih teknologi Jepang kepada Indonesia yang pada gilirannya akan menguatkan struktur industri dalam negeri sehingga produk-produk Indonesia terutama produk-produk pada sektor silang dan spesifik dapat kompetitif bersaing di pasar global.³⁹

³⁸ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3725/profil/71/kode-etik>. Terakhir diakses pada 24 Juli 2013 pukul 12.34 WIB.

³⁹ <http://www.noodles.com/view/58AF8E262DBAD2784B8407D011214F61BDB54C7A>. Terakhir

e) Peningkatan Investasi Jepang

Penanaman modal atau investasi asing merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan mutu barang dan jasa lokal, sehingga produk lokal akan mampu bersaing dengan barang-barang asing. Selain itu, penanaman modal sering kali dilihat sebagai elmen untuk meningkatkan kualitas kerja. Indonesia adalah negara berkembang yang memerlukan banyak sekali investasi untuk mengembangkan perekonomian negara.⁴⁰

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan penting bagi investasi Jepang, walaupun peringkatnya sebagai negara tujuan menurun sejak krisis ekonomi 1998. EPA akan meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi investor Jepang untuk meningkatkan penanaman modal mereka di Indonesia dibidang-bidang yang diminati sekarang seperti di sektor elektronika, otomotif, kimia dan peralatan kantor. Selain itu, EPA dapat mendorong peningkatan investasi di sektor prasarana, penciptaan mitra industri pendukung untuk sektor otomotif dan elektronik, dan peningkatan investasi pada produk olahan dari sektor-sektor berbasis sumber daya alam.

Sekurang-kurangnya ada dua motivasi bagi para investor Jepang (perusahaan Jepang) untuk menanamkan modal di Indonesia. *Pertama*, tersedianya angkatan kerja yang melimpah yang dibutuhkan industri padat karya seperti tekstil, otomotif, dan elektronik. *Kedua*, sebagai pengaman

EPA juga berhasil memperdalam struktur industri dengan investasi industri pendukung (*components, parts, mold and die*), dimana *supplier* Indonesia dapat juga berkembang dengan fasilitasi dari *Manufacturing industry Development Center*. Dari ini investasi yang ada dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, dan kehutanan, dimana kemitraan dan keikutsertaan UKM dapat difasilitasi dengan berbagai proyek kerja sama bersama para investor Jepang. Selain itu, investasi dibidang energi termasuk bio fuel yang juga akan difasilitasi oleh proyek kerjasama dengan Jepang, serta meningkatkan investasi di bidang prasarana seperti jalan tol serta proyek-proyek prasarana umum lainnya.

4. *Treats* (ancaman)

a) Hambatan Non-Tarif

Hambatan non-tarif adalah hambatan untuk mengimpor dalam bentuk selain tarif. Diantaranya perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di Jepang yang berhubungan dengan produk pertanian dan perikanan. Hal ini diberlakukan karena pemerintah Jepang senantiasa melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar termasuk mutu barang, sehingga diperlukan pemberlakuan seragkaian peraturan yang mengacu pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, barang yang diproduksi di Jepang termasuk barang-barang impor harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku

Hambatan non-tarif ini merupakan kendala serius yang dihadapi oleh produk ekspor Indonesia ke Jepang. Standarisasi di Jepang sangat tinggi, tidak banyak produk Indonesia yang dapat lolos verifikasi standar kelayakan produk tersebut. Penerapan standarisasi mutu adalah cara yang sering digunakan negara maju untuk menghambat masuknya produk negara berkembang. Tarif BM yang sudah diturunkan bahkan 0 persen menjadi tak ada manfaatnya. Ekspor Indonesia ke Jepang didominasi produk yang kurang mendapatkan sentuhan teknologi, yakni produk primer seperti kopi, karet, kayu lapis, ikan, udang, dan sebagainya. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang mencakup produk padat modal dan padat iptek seperti otomotif dan komponen, elektronik, beraneka barang dari plastik dan sebagainya.

b) Liberalisasi Barang dan Jasa

Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antar negara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain dibidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Selain itu, sistem perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Akses terbuka ini menjadi tertutup jika terjadi ketimpangan teknologi dan informasi perdagangan

sehingga dunia usaha negara berkembang seperti Indonesia menjadi dirugikan.⁴¹

Dalam forum kerjasama ekonomi dan perdagangan IJEPA yang sudah disepakati prinsipnya, Indonesia setuju mengurangi bea masuk impor mobil, produk elektronik, dan komponen otomotif serta produk baja dari Jepang. Sementara Jepang akan menurunkan bea masuk produk industri, pertanian dan kehutanan yang diimpor dari Indonesia. Hal ini akan memberikan keuntungan yang besar kepada pihak Jepang. Dengan adanya penurunan bea masuk ini Jepang akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari barang otomotifnya. Barang otomotif Jepang merupakan barang yang mempunyai pasar yang besar di Indonesia. Sedangkan Indonesia hanya bisa mengimpor produk-produk pertanian yang hanya memberikan sedikit keuntungan.

Pasar yang terbuka luas akan memudahkan Jepang untuk menguasai pasar Indonesia. Dengan demikian secara perlahan Jepang akan mematikan perusahaan-perusahaan nasional. Sebelum dilakukan EPA ini Jepang sudah menguasai 95 persen pasar otomotif dan elektronik Indonesia. Semua ini dilakukan oleh pengusaha Jepang tanpa melakukan alih teknologi ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Pembukaan pasar di Indonesia hanya dilakukan bila produk serupa dari Jepang tidak merupakan *direct competitor* dari produk Indonesia. Produk *direct competitor* adalah

⁴¹Op Cit., *Perjanjian Perdagangan*,. Hlm. 127-128.

produk serupa yang secara langsung bersaing dalam pasar. Jika semua produk dilakukan pembukaan pasar maka perusahaan-perusahaan serta industri kecil dan menengah akan mati. Untuk bersaing dengan produk Jepang, industri dalam negeri akan mengalami kesulitan yang besar. Dengan SDM yang bermutu rendah dan teknologi yang terlalu kuno hanya akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas rendah, padahal konsumen Indonesia sendiri tidak percaya dengan jaminan kualitas produk dari negaranya.

Hal tersebut berimplikasi pada banjirnya berbagai produk (otomotif, mesin-mesin industri, makanan, minuman, dll) impor Jepang di Indonesia, sedangkan bagi Indonesia sulit untuk melakukan hal serupa (ekspor) bukan karena tingginya bea masuk (BM) tetapi lebih banyak terkendala oleh hambatan non tarif BM seperti standarisasi produk, juga isu kualitas dan kesehatan. Selain itu, tidak ada kepastian surplus perdagangan Indonesia-Jepang akan terus stabil dan meningkat pada masa yang akan datang. IJEPA diperkirakan akan mendongkrak nilai ekspor Jepang ke Indonesia dan memperlambat peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Jepang.

c) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Jepang menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk bersaing. Teknologi Jepang yang canggih akan membuat Indonesia mengalami ketergantungan dengan Jepang. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh Jepang demi kepentingan

nasionalnya. Pasalnya barang-barang ekspor Jepang ke Indonesia adalah barang yang sarat dengan teknologi mutakhir. Dengan barang sedemikian rupa, Indonesia adalah pasar yang sangat baik bagi produk Jepang. Orang Indonesia sudah meyakini bahwa setiap produk buatan Jepang memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan produk yang lain. Barang-barang elektronik dan otomotif tersebut merupakan produk andalan Jepang yang membanjiri pasar Indonesia. Penjualan produk otomotif dan elektronik Jepang di Indonesia merupakan yang paling besar. Jepang merupakan pembuat produk otomotif dan elektronik yang berkualitas dan sangat mengerti dengan kebutuhan Indonesia.

Jepang sendiri selama ini tidak melakukan alih teknologi terhadap Indonesia. Sumber daya manusia Indonesia tidak dilatih untuk membuat teknologi sendiri, mereka hanya dipergunakan sebagai pekerja operasional di perusahaan Jepang. Di tingkat yang lebih tinggi perusahaan Jepang hanya menempatkan pekerja dari orang Jepang sendiri. Mereka masih tidak mudah untuk memberikan teknologinya ke Indonesia.

d) Besarnya Investasi Jepang

Di bidang investasi, Jepang mendapat banyak keuntungan dari Indonesia. Lebih dari 30 tahun, Jepang membangun perusahaan otomotif di Indonesia. Namun, sampai saat ini, perusahaan otomotif itu masih bergantung sepenuhnya pada perusahaan Jepang sebagai

prinsipal. Indonesia tetap tidak mampu memproduksi mobil dan motor merk sendiri.

Di tahun 2012, realisasi investasi perusahaan Jepang di Indonesia ditujukan untuk perluasan bisnis perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia, khususnya guna memenuhi naiknya jumlah permintaan, dan juga perusahaan manufaktur skala menengah, untuk memasok komponen pabrikan besar, yang telah lebih dulu beroperasi di Indonesia. Jumlah realisasi investasi Perusahaan asal Jepang di Indonesia pada tahun 2012 menduduki peringkat kedua, di bawah Singapura, dengan nilai US\$2,5 miliar atau 10% dari keseluruhan investasi asing yang sebesar US\$24.6 miliar, setara dengan Rp221.0 triliun.

Dengan penambahan atau peningkatan investasi setelah EPA ini ditandatangani, akan menyebabkan Indonesia menjadi negara asset Jepang. Investasi Jepang di Indonesia akan mengalirkan uang yang banyak ke Jepang. Jepang hanya akan merealisasikan investasi atau kerjasama bisnis yang sesuai dengan kepentingan Jepang. Dengan demikian para investor Jepang hanya akan melakukan investasi di bidang yang akan menguntungkannya dan tidak memperhatikan hal yang lain. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya mereka akan memanfaatkan SDM Indonesia yang rendah, yaitu dengan memberikan upah yang rendah.

Perusahaan-perusahaan multinasional Jepang yang ada di Indonesia akan mengembangkan industrinya bagi kepentingan pasar global. Dengan penambahan investasi ini perusahaan-perusahaan Jepang akan menjadi perusahaan raksasa yang akan mengalirkan uang yang besar kepada pihak Jepang. Perusahaan Jepang yang ada di Indonesia akan mengekspor produknya ke negara lain sehingga Indonesia hanya sebagai tempat industri dan pembuangan limbah perusahaan.

B. SWOT Indonesia Dalam Forum ACFTA

Setelah sebelumnya dibahas tentang SWOT Indonesia terhadap Jepang dalam forum kerjasama IJEPA, yang tidak memberikan surplus berkelanjutan. Saat ini akan dibahas tentang SWOT Indonesia terhadap China dalam forum kerjasama ACFTA. Tidak jauh berbeda dengan SWOT Indonesia terhadap Jepang, terutama pada kekuatan dan kelemahan Indonesia. Adapun perebutan peluang dalam kerjasama ACFTA ini, lebih kompleks karena pengaturan perdagangan barang dan jasa melibatkan setiap anggota ASEAN, dan tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara internal ASEAN untuk memanfaatkan potensi pasar China. Tidak hanya itu, proporsi tantangan ACFTA bagi Indonesia juga jauh lebih besar, karena kebanyakan industri di Indonesia belum memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat untuk

1. *Strengths* (Kekuatan)

a) *SDA Melimpah dan SDM Murah*

Sebagaimana telah dibahas dimuka, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusianya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebanyak 237.556.363 orang (BPS Agustus 2010). Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat dapat menciptakan pasar yang potensial, sementara itu luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang terus membaik merupakan potensi daya tawar dan daya saing yang luar biasa.⁴²

Salah satu keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, dan dalam merespon tuntutan pasar tenaga kerja baik skala nasional maupun internasional, adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Keseriusan Pemerintah tersebut, terlihat jelas dengan diterbitkannya Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang merupakan kesatuan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi, antara lain UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 9 Tahun 2009 tentang

⁴²http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisicomplete_%202010-2011-2012.pdf

BHP, RPP tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan HELTS (*Higher Education Long Strategy*) 2003-2010.

Selain keseriusan dalam meningkatkan mutu SDM seperti tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga cukup serius dalam memanfaatkan potensi SDA yang ada. Buktinya pada tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, antara lain : kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia) serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet dan perikanan.

Dalam kesepakatan *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* berbagai potensi sumber daya alam Indonesia baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral), menjadi nilai *plus* sebagai daya tawar sekaligus daya saing yang luar biasa di setiap perjanjian internasional terutama dalam ACFTA. Faktanya sampai saat ini (dilakukannya penelitian ini) Indonesia masih memiliki cadangan energi yang sangat besar tersebar di daratan dan lautan teritorial Indonesia, seperti misalnya batubara, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung

... dan ...

Potensi lainnya, yang membuat Indonesia semakin diperhitungkan sebagai partner dagang yang utama adalah letak geografis Indonesia yang sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di dunia), yaitu dilewati oleh satu *Sea Lane of Communication* (SLoC) atau Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global.

b) Pasar Potensial Bagi Produk-produk China

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa, dan dengan daya beli yang tinggi disertai dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih mencari barang murah (kurang memperhatikan asal/nasionalisme dan komparasi kualitas), berhasil menciptakan pasar yang potensial bagi produk-produk China. Terbukti sejak diberlakukannya ACFTA Januari 2010 lalu, permintaan akan sejumlah produk-produk asal China di beberapa sektor mengalami peningkatan. Salah satunya adalah sektor industri pertanian buah-buahan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) total impor buah-buahan asal China per Triwulan I-2012 senilai US\$ 140,9 juta atau sekitar 1,26 triliun. Bandingkan dengan triwulan I-2011, impor buah-buahan mencapai US\$ 115,6 juta (Rp. 1,04 triliun) termasuk jeruk dan pir atau mengalami kenaikan 20%. Pada sektor pertanian tersebut, buah-buahan dari China misalnya jeruk Danzhen di pasar tradisional maupun

di supermarket lebih murah daripada jeruk Pontianak maupun jeruk Medan. Demikian apel dari China lebih murah dari apel Malang.⁴³

Dari beberapa produk China seperti tersebut di atas, dan hampir semua produk dari *Hightech* (teknologi tinggi) sampai *lowtech* (teknologi rendah), seperti : produk tekstil, kerajinan, mainan, otomotif, produk kesehatan, mesin-mesin, elektronik dan produk pertanian dapat dipasarkan dengan harga yang sangat murah dan laku terjual, bahkan lebih murah dari produk lokal sejenis (biasanya harganya hanya 1/4-1/6), kualitas tidak menjadi faktor penentu penting terutama bagi konsumen Indonesia menengah ke bawah.

Hal tersebut, telah menciptakan peluang pasar yang signifikan bagi China, mengingat daya beli masyarakat Indonesia sangat ditentukan oleh harga yang relatif lebih murah terutama masyarakat menengah ke bawah (mayoritas). Keuntungan lain misalnya terjadi pada sektor industri elektronik, pada tahun 2011 impor produk elektronik mencapai US\$ 5, 77 miliar, naik dari tahun 2010 yang sebesar US\$ 5, 07 miliar. Impor laptop memberi kontribusi terbesar yaitu senilai US\$ 1 miliar atau naik 15, 04 % dari tahun sebelumnya. Begitu potensialnya pasar Indonesia bagi produk-produk China, peluang ini tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, dan dapat didistribusikan sebagaimana mestinya (sektor-

⁴³Op Cit., *Memperdagangkan Kedaulatan*,. Hlm. 215.

sektor industri yang belum kuat menghadapi gempuran produk impor) guna peningkatan daya saing di pasar global.

c) Banyaknya UMKM

Kemandirian dan ketahanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis ekonomi 1997/1998 dan 2008/2009 menjadi bukti begitu potensialnya UMKM sebagai fondasi perekonomian nasional. Belum lagi kemampuan UMKM dalam menyerap banyak tenaga kerja, suatu hal yang sulit dicapai oleh jenis usaha yang lain. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, sampai dengan November 2010 pertumbuhan kredit UMKM mencapai 25,1%, lebih tinggi dari non-UMKM yang hanya 18,9%. Artinya, kata Hatta, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 2010 tidak dapat diabaikan.⁴⁴

Sementara, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 memperkirakan jumlah UKM di Indonesia sebesar 56,5 juta unit atau mencapai 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, tumbuh sebesar 2,47% dibandingkan tahun 2011. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UKM sebesar 107,6 juta atau sebesar 97,6% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UKM adalah sebesar 29,08% dari total PDB Indonesia sehingga UKM harus terus diberdayakan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantunya

⁴⁴ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/01/26/160705-kontribusi-umkm->

mengatasi permasalahan yang dihadapi UKM seperti keterbatasan SDM, jangkauan pemasaran yang terbatas, susahya mengakses pembiayaan dari perbankan, belum adanya pembukuan yang terstandar, belum adanya legalitas usaha, dan keterbatasan modal.⁴⁵

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasalahkan proses pembangunan ekonomi nasional, dan dalam mendorong peningkatan daya saing Indonesia pasar global. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah dipedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002).

Dengan demikian, diharapkan kendala-kendala yang masih menghambat proses peningkatan kualitas produk UMKM di Indonesia, dapat diatasi melalui investasi negara-negara anggota ASEAN terutama China, karena banyaknya UMKM tersebut merupakan ladang bisnis juga bagi mereka.

d) *Market Saturation* (Kejenuhan Pasar China)

Reformasi ekonomi China di mulai dengan gagasan Deng Xiaoping tentang keterbukaan terhadap struktur ekonomi global.

Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memberikan akses untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari mekanisme pasar pada era globalisasi ini.⁴⁶ Motivasi China dalam melakukan perdagangan bebas sebagai anggota WTO ataupun sebagai individu terutama dalam kesepakatan ACFTA secara umum adalah untuk memperbesar volume perdagangan dan meningkatkan daya saing ekonomi, namun secara khusus seiring dengan tingginya produktivitas industri di China telah membawa China pada fase kejenuhan pasar.

Kejenuhan pasar yang dialami oleh China (pengusaha/pembisnis), memotivasi mereka untuk beralih dan memilih pasar yang akurat di luar negeri. Hal tersebut dikarena kemampuan daya beli masyarakat China sangat terkonsentrasi pada kebutuhan-kebutuhan pokok, (produk-produk pertanian) dan kurang menguntungkan bagi pengusaha lokal. Pasalnya meskipun China memiliki 1,3 miliar penduduk, namun penghasilan rata-rata penduduk China tidak lebih dari 1000 dollar AS per tahun.⁴⁷ Selain itu, China selalu mengalami kelebihan persediaan, dan dengan demikian margin keuntungan selalu tipis. Satu-satunya jawaban adalah dengan membangun sebuah benteng di negeri seberang yang masih memungkinkannya

⁴⁶ Winarno, Budi., *Pertarungan Negara VS Pasar*, (Yogyakarta : MedPress, 2009),. Hlm. 196.

⁴⁷ Haley, George, Haley Usha C.V., dan Tang, Chin Tiong, *The Chinese Tao of Business : Rahasia Kesuksesan dan keunggulan Strategi Bisnis Pengusaha China*, terj : Arfan Achyar, (Jakarta: Hikmah, Januari 2008),. Hlm. 170-171

2. *Weaknesses* (Kelamahan)

a) Mutu SDM Rendah

Era perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang kini menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat, khususnya para pengusaha sebenarnya bukan barang baru karena Indonesia adalah negara yang terpengaruh atau menjadi negara yang ikut dalam perdagangan bebas dalam bentuk AFTA atau WTO. Terlepas dari permasalahan ekonomi terutama dalam produk hasil industri, pasar global akan berdampak pada sektor Sumber Daya Manusia. Tantangan pasar global menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan dalam memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja.

Jika kita perhatikan indikator *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih sangat memprihatinkan, pada tahun 2002 nilainya 0,684 berada pada urutan ke-110. Pada tahun 2003 HDI Indonesia semakin memburuk menduduki peringkat 112 di bawah Vietnam (109), Thailand (74) dan Brunei Darusalam (31), Korea (30), dan Singapura (28). Selanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 HDI Indonesia secara berturut-turut berada pada peringkat 111 dan 110.⁴⁹

⁴⁹<http://asm.ariyanti.ac.id>. Terakhir diakses pada 30 Juni 2013 pukul 14.31 WIB.

Sedangkan, menurut “The 2006 Global Economic Forum of Global Competiveness Index (GCI)” yang di-*release* World Economic Forum (WEF), daya saing global Indonesia kini berada pada posisi yang terpuruk. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan (perguruan) tinggi. Rendahnya mutu SDM Indonesia terlihat pada tingginya tenaga kerja tidak terdidik, dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel. 4. Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan
Periode Agustus 2007 – Februari 2009 (dlm Juta Orang)

Pendidikan	2007	2008		2009
	Agustus	Februari	Agustus	Februari
SD Kebawah	56,37	55,62	55,33	55,43
Sekolah Menengah Pertama	18,83	19,39	19,04	19,48
Sekolah Menengah	12,75	13,90	14,39	15,13

Atas				
Sekolah Menengah Kejuruan	5,79	6,71	6,76	7,19
Diploma I/II/III	2,60	2,66	2,87	2,68
Sarjana	3,60	3,77	4,15	4,22

Sumber : Biro Pusat Statistik

b) Mutu UMKM Rendah

Peran dan fungsi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM tidak dapat diragukan lagi, baik oleh negara berkembang maupun oleh negara maju. Sebagaimana di negara maju, UMKM di Indonesia juga menunjukkan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99% dalam struktur perekonomian nasional. Namun jika kita cermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat, dan keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta sebagai motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal.⁵⁰

⁵⁰ <http://upy.ac.id/ekonomi/files/PERAN%20USAHA%20MIKRO%20KECIL%20DAN%20MENENGAH%20%28UMKM%29%20DALAM%20KEBIJAKAN%20PENANGGULANGAN%20KEMISKINAN%20DAN%20PENGANGGURAN%20%20%28P.%20EKO%20PRASETYO%29.pdf>. Terakhir diakses pada 3 Juli 2013 pukul 14.57 WIB.

Secara internal, keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan; modal, teknik produksi, pangsa pasar, manajemen, dan teknologi, serta lemah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan, secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah seperti: persoalan perijinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan.

Kendala internal dan eksternal tersebut, berdampak pada penurunan mutu dan daya saing (produktivitas) UMKM Indonesia terhadap gempuran produk-produk negara-negara anggota ASEAN terutama China yang menjangkau hampir semua segmen pasar Indonesia dalam skema ACFTA.

c) Mutu Barang Ekspor Rendah

Sejalan dengan penurunan tarif yang dilakukan Indonesia, perlahan kita mulai menyadari kenyataan bahwa produknya kurang kompetitif di beberapa sektor, terutama industri manufaktur, sehingga telah mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan pada beberapa produsen lokal di berbagai sektor. Analisis dari bapak M. Chatib Basri, seorang dosen dan peneliti di FEUI mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan produk Indonesia kurang kompetitif, yaitu biaya

logistik yang sangat tinggi, undang-undang tenaga kerja yang sangat memberatkan pengusaha, dan pemerintahan yang belum bersih.⁵¹

Sebagaimana dicatat oleh Biro Pusat Statistik, hingga Agustus 2009 ekspor manufaktur Indonesia merosot hampir 25 % dari total 60, 831 miliar dollar AS menjadi 45, 632 miliar dollar AS. Penurunan ini juga menurunkan total ekspor non-migas sebesar 18, 31 persen. Bahkan dalam perhitungannya, Depperin juga memperkirakan penurunan nilai ekspor dua belas industri manufaktur unggulan, seperti industri pengelolaan kelapa sawit mentah (CPO), besi baja, otomotif, elektronika, pengelolaan karet, pulp dan kertas, serta industri peralatan listrik sebesar 7, 33 persen sepanjang tahun 2009.

Sementara, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Thomas Darmawan mengungkapkan, sejumlah produk makanan dan minuman Indonesia senilai US\$ 15 ribu ditolak pasar Cina. Penolakan tersebut karena negara itu mengeluarkan standar baru tentang makanan dan minuman impor.⁵² Selain itu, buah asal Indonesia yaitu alpukat, salak dan manggis juga di tolak, karena diduga mengandung logam berat dan organisme penyakit tanaman

⁵¹ <http://kanopi-feui.blogspot.com/2010/04/acfta-ancaman-atau-peluang.html>. Terakhir diakses pada 29 Juni 2013 pukul 12.46 WIB.

⁵² <http://www.tempo.co/read/news/2009/06/22/090183253/Makanan-Senilai-US-15-Ribu-Ditolak-Cina>. Terakhir diakses pada 2 Juli 2013 pukul 12.31 WIB.

(OPT). China juga melarang masuknya sarang burung walet asal Indonesia karena diduga adanya bahaya residu.⁵³

d) Ekspor Komoditas Primer

Kecenderungan ekspor Indonesia dalam skema ACFTA terutama kepada China, adalah mengekspor barang mentah, seperti batu bara, gas, timah dan sumber daya alam lainnya yang tidak dapat diperbaharui. Padahal, China sebagai pusat industri di dunia lebih memilih memanfaatkan batu bara untuk menjaga pasokan atau penyediaan listrik murah, karena listrik merupakan faktor penting untuk menciptakan daya saing dan menarik investasi. Sementara di Indonesia, PLN gagal menjaga pasokan listrik dan tingkat harga, karena pemerintah lebih mendukung sumber daya penunjang seperti batu bara dan gas untuk diekspor ke luar negeri daripada untuk membangun industri. Demikian juga pada pengolahan timah, China tidak menjadikan komoditas ekspor timah untuk membangun struktur industri elektronik yang *deep* dan kompetitif. Sedangkan di Indonesia sumber daya alam tersebut dibiarkan untuk diolah oleh negara lain.

Ekspor Indonesia ke Cina utamanya adalah bahan mentah, ternyata porsi terbesar ekspor Indonesia ke Cina adalah barang konsumsi (tahun 2008: 35,5% dari ekspor Indonesia-Cina), lalu di tempat kedua adalah bahan mentah (tahun 2008: 31,7% dari total ekspor Indonesia-Cina),

dan di tempat ketiga adalah barang setengah jadi (tahun 2008: 28% dari total ekspor Indonesia-Cina). Meskipun, kuantitas ekspor bahan mentah ke China menempati urutan kedua, namun hal tersebut tetap saja menjadi kelemahan yang seharusnya bisa disesuaikan dengan mengkespor turunan dari barang mentah.

e) Implementasi UU Investasi Rumit

Infrastruktur untuk mendukung dan mendorong peningkatan investasi di Indonesia masih belum memadai. Infrastruktur ini terkait dengan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) seperti pelayanan, iklim usaha, komunikasi, kepastian hukum, undang-undang dan lain-lain. Demikian juga infrastruktur keras (*hard infrastructure*) seperti sarana transportasi, sarana komunikasi, pelabuhan, jalan dan lain-lain. Pelayanan dan birokrasi serta iklim usaha di Indonesia masih belum optimal. Beberapa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum sinkron dalam mengambil kebijakan mengenai investasi, termasuk banyaknya pungutan yang akan menimbulkan biaya tinggi (*high cost*).

Isu tingginya tingkat korupsi di Indonesia juga merupakan hal yang menjadi pertimbangan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Investasi yang masuk Peningkatan daya saing Indonesia dapat terlihat dari banyaknya. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi sistem pemerintahan. Lima hal yang merupakan hambatan peningkatan investasi China ke Indonesia antara lain diperlukan

tenaga kerja yang murah, peningkatan layanan pabean yang cepat, peningkatan efisiensi jasa pendukung yang tinggi terutama terkait masalah telekomunikasi dan transportasi, serta kepastian hukum, demikian juga layanan pemerintah.

3. *Opportunities* (Peluang)

a) *Penurunan Tarif BM*

Di Indonesia sendiri, penurunan tarif sebenarnya telah dilakukan secara unilateral (sepihak) dengan sangat cepat sejak reformasi. Hal ini didorong oleh LOI dengan IMF sewaktu krisis tahun 1997 yang mengharuskan Indonesia untuk lebih terbuka pada perdagangan. Hasilnya, di tahun 2008 tingkat tarif Indonesia telah berada pada rata-rata 4,63%. Pada prosesnya, penurunan tarif di Indonesia dilakukan secara bertahap, yaitu dari rata-rata 6% ke 4% di tahun 2008, lalu 4% ke 3% di tahun 2009, dan memasuki 2010 menjadi 0% untuk barang *normal track* pada perdagangan di ACFTA.

Pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN dengan China sejak 1 Januari 2010 telah menciptakan pasar bersama untuk 1,7 miliar penduduk di kawasan ini. Bagi negara-negara ASEAN yang gabungan penduduknya hanya sekitar 500 juta jiwa, masuknya China merupakan peluang besar untuk dapat memasuki pasar dari negara paling besar di dunia ini.⁵⁴ Peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar China adalah

⁵⁴ Q. Gid. Mempertahankan Kedaulatan. Ulm. 211-212

dengan tingkat tarif yang relatif rendah dan jumlah penduduk yang besarmeningkatkan kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “aliansi strategis”. Pembentukan aliansi strategis tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian bagi produk unggulan Indonesia dalam memanfaatkan peluang pasar China, dan Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.⁵⁵

Pembentukan “aliansi stategis” tersebut berimplikasi pada peninjakan *mutual recognition agreement* (MRA) atau perjanjian saling pengakuan agar produk pertanian dari kedua negara lebih mudah diterima satu sama lain. Menteri Pertanian Suswono mengatakan akan ada empat produk pangan dari masing-masing negara yang diajukan dalam MRA ini. "China mengusulkan bawang putih, apel, pir, dan citrus. Indonesia mengusulkan salak, manggis, alpukat, dan sarang burung walet," kata Suswono Menteri Pertanian.⁵⁶

b) Terbukanya Akses Pasar

Pengurangan tarif bea masuk (BM) secara bertahap sampai dengan nol persen dalam kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), telah membuat perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN terutama Indonesia dengan China semakin terbuka. Hal lainnya adalah Bagi ASEAN terutama Indonesia, ACFTA

⁵⁵ *ditjenkpi.kemendag.go.id/.../Implikasi_ACFTA20050808105154.doc* .Terakhir diakses pada 29 Juni 2013 pukul 12.37.

berguna untuk mengurangi ancaman pertumbuhan perekonomian China yang sangat pesat. Melalui ACFTA, negara-negara ASEAN memiliki akses untuk dapat masuk ke pasar domestik China yang begitu besar dan luas, memberikan peluang peningkatan ekspor dengan tingkat tarif yang lebih rendah, disamping juga peningkatan kerjasama antara pelaku bisnis melalui pembentukan 'Aliansi Strategis', akses pasar jasa, *regional production base*, pasar regional sekaligus global, arus investasi, dan terbukanya transfer teknologi. Saat ini, produk impor dari China yang mendominasi pasar di dalam negeri adalah mainan anak dengan menguasai 73% dari total impor negara pengekspor lainnya. Posisi kedua dikuasai oleh produk mebel China dengan menguasai 54%. Produk elektronika menguasai 36%, tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 33% dan permesinan sebesar 22%.⁵⁷

c) Pembukaan Lapangan Pekerjaan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar disuatu sisi bisa dijadikan modal dasar yang menguntungkan, karena tersedianya tenaga kerja untuk beberapa sektor usaha. Namun demikian, jika jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai dapat menimbulkan permasalahan. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang menghadapi masalah tersebut.

⁵⁷ *Op Cit.*, Perjanjian Perdagangan., Hlm. 261.

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menekan laju jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Salah satu harapan pemerintah Indonesia adalah melalui skema perjanjian ACFTA. Karena skema perjanjian tersebut, sebenarnya memberikan peluang lapangan pekerjaan yang besar bagi tenaga kerja Indonesia, mengingat ada beberapa perusahaan dari negara-negara anggota ASEAN terutama China yang berinvestasi dalam bentuk pembukaan pabrik-pabrik industri maupun non-industri.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, dengan merujuk pada data BPS Agustus 2012, rendahnya kualitas angkatan kerja terindikasi dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang tidak berimbang, yakni sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 47,39 persen. Sedangkan angkatan kerja lulusan SMP 18,57 dan Diploma hingga Sarjana hanya 9 persen.⁵⁸ Sehingga dalam hal ini, Indonesia hanya mampu mempekerjakan para angkatan kerjanya keluar negeri bukan sebagai tenaga kerja profesional melainkan sebagai supir dan pembantu rumah tangga.

Dengan demikian, kesepakatan ACFTA dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan menjadi sia-sia, dan peluang kerja di negeri sendiri menjadi semakin sulit untuk dijangkau oleh kebanyakan angkatan

⁵⁸ <http://www.antaraneews.com/berita/369879/tenaga-kerja-indonesia-hadapi-tiga-masalah-besar>.

kerja Indonesia. Akhirnya pembukaan lapangan pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan asing dalam skema ACFTA lagi-lagi didominasi oleh tenaga kerja asing. Menurut, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muchtar Luthfie, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia terbanyak berasal dari negeri Cina, yaitu sekitar 16.149 orang.⁵⁹

d) Terbukanya Transfer Teknologi

Kesepakatan ACFTA selain telah menciptakan pasar regional yang besar, juga berpeluang bagi negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan China untuk melakukan transfer teknologi. Peluang tersebut, membuka kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN dan China terutama Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing produk di pusran pasar global. Karena dalam hal ini, Indonesia masih disudutkan dengan mutu kualitas yang rendah akibat penggunaan mesin berteknologi rendah (manual tradisional), terutama pengembangan produk (kuantitas dan kualitas) pada sektor pertanian.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian Indonesia diantaranya adalah seperti dalam hal penerapan pengolahan dan penerapan teknologi dalam pengelolaan pertanian, hal ini terkait dengan *Technology Transfer* termasuk *Bio Technology* yang tercantum

⁵⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/06/173388395/Cina-Pekerja-Terbanyak-di-Indonesia>. Terakhir diakses pada 4 Juli 2013 pukul 10.15 WIB.

di salah satu butir dalam perjanjian ACFTA, sehingga dapat lebih membuka peluang bagi Indonesia dalam adopsi teknologi yang lebih baik bagi pertanian Indonesia. Dengan adopsi teknologi dan penanganan terhadap komoditas pertanian yang baik maka permintaan yang menuntut kualitas tinggi, kuantitas besar, ukuran seragam, ramah lingkungan, dan kontinuitas produk jauh lebih akan mudah untuk dipenuhi.

Selain itu, untuk mengetahui perkembangan preferensi pasar (permintaan konsumen), trend konsumen yang akan datang termasuk meningkatnya tuntutan konsumen akan informasi nutrisi serta jaminan kesehatan dan keamanan produk-produk pertanian maka perlu adanya jaringan komunikasi yang baik, hal ini berkaitan erat dengan adanya pengembangan terhadap bidang teknologi informasi (IT) yang tertuang dalam ACFTA.

e) Peningkatan Investasi China

Peningkatan investasi China ke Indonesia akan dapat dicapai karena Indonesia mempunyai berbagai keunggulan, antara lain stabilitas ekonomi relatif baik. Demikian Pemerintahan yang relatif stabil, termasuk masalah sosial dan politik cukup kondusif, yang berarti *risk country* Indonesia terus menurun. Kekuatan utama lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai sumber-sumber daya alam termasuk sumber energi yang melimpah seperti batubara, minyak dan

relatif murah. Dengan berbagai peluang ini tentu investor China akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁶⁰

Upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi rill di dalam negeri, mencapai klimaksnya pada saat Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PM), menetapkan kebijakan penanaman modal untuk (a) mendorong terciptanya iklim nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU tersebut di atas sesungguhnya sudah mencakup semua aspek penting yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua aspek yang merupakan

⁶⁰ http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/Ragimun_Analisis%20investasi%20China%20ke%20Indonesia%20sebelum%20dan%20sesudah%20ACFTA.pdf. Terakhir diakses pada 2 Juli 2013 pukul 17.24 WIB.

masalah serius yang dihadapi pengusaha. Oleh karena itu, UU tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia.⁶¹

4. *Treats* (Ancaman)

a) Hambatan Non-Tarif

Berkurangnya hambatan tarif dalam perdagangan bebas tidak selalu berarti akan semakin mudahnya untuk mengekspor setiap produk Indonesia ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan negara-negara pengimpor menggunakan hambatan non-tarif yang tidak jarang dipolitisir untuk meningkatkan *bergaining position* mereka dalam mendikte pasar. Hambatan-hambatan non-tarif yang dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, kesehatan konsumen, masalah lingkungan dan sebagainya semakin lama semakin banyak dan semakin mempersulit ekspor Indonesia. Di sisi lain terjadi pula perubahan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian semisal *just in time dellivery* dan *tailor made order*, menjadikan hambatan dan tantangan yang semakin besar bagi pengembangan ekspor untuk setiap sektor industri dan komoditi hasil Indonesia. Pengenaan hambatan non-tarif antara lain dilakukan di pelabuhan tertentu dengan pengaturan waktu tertentu, penetapan kuota impor, penetapan importir tertentu, serta penetapan bank tertentu untuk pembukaan *Letter of Credit (L/C)* untuk barang impor.

Harapan untuk mendapatkan perlakuan seimbang dan memanfaatkan pasar negara maju pada kenyataannya sangat sulit. Apalagi hal ini disebabkan negara maju masih melakukan perlindungan untuk pasar dengan tarif dan bea masuk (karena desakan dari lobi produsen yang kuat di dalam negerinya), memberlakukan subsidi untuk produk-produk pertanian dan produk strategis di negaranya.⁶²

b) Liberalisasi Barang dan Jasa

Memasuki abad ke-21, kekuatan China semakin mempunyai kepercayaan diri yang amat tinggi. China resmi masuk diterima menjadi anggota WTO. Dengan demikian, China telah lengkap memasuki semua organisasi internasional yang ada. China berhasil memanfaatkan WTO dengan maksimal karena sejak saat inilah China mengirimkan "air bah ekspor" ke seluruh dunia, yang membuat negara-negara di seluruh dunia megap-megap karenanya. Dengan status sebagai salah satu anggota WTO, China dapat menembus semua pasar di seluruh dunia.

Sudah menjadi pandangan umum bahwa Cina adalah ancaman bagi perekonomian Indonesia, apalagi dihadapkan dengan produk Indonesia yang kurang kompetitif. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini selama beberapa tahun terakhir bahkan telah mampu menjadi eksportir terbesar dunia, mengalahkan kekuatan lama seperti : Amerika

⁶²*Op Cit.,Memperdagangkan Kedaulatan.,* Hlm. 219-220.

Serikat, Jepang dan Jerman. Harga barang dari Cina yang begitu rendah telah membuat produsen barang industri manufaktur di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terancam karena tidak mampu bersaing. Hal ini lah yang menjadi ketakutan terbesar sebagian besar orang ketika menghadapi kenyataan bahwa tarif untuk barang-barang tertentu dari Cina telah menyentuh nol persen.

Penandatanganan perjanjian Indonesia dalam AC-FTA, berdampak serius pada pelaku bisnis dalam negeri terutama bisnis kecil dan menengah (UMKM), karena mereka merasa belum siap dengan pelaksanaan AC-FTA. Sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak AC-FTA adalah industri tekstil, manufaktur, pertanian, dan kerajinan. Misalnya dilaporkan bahwa 2.000 industri kecil tekstil yang mempekerjakan 12-50 tenaga kerja terancam tutup. (Majalah Tempo, Edisi 09/39, 26 April 2010). Selain itu, data dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM (Koran Tempo 28 Mei 2009) menunjukkan jumlah pengusaha yang tergolong mikro mencapai 50,7 juta, pengusaha kecil 522.220, dan pengusaha menengah 39.660. Sektor UMKM ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar dibandingkan sektor formal lainnya.⁶³

ILO Indonesia menyelenggarakan proyek "*Assesing and Adressing the Effects of International Trade on Employment*" (ETE) yang didanai oleh Uni Eropa untuk membahas mengenai dampak liberalisasi

perdagangan terhadap pekerja. Dari laporan tersebut didapat bahwa kebijakan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Jepang dan China telah berdampak pada penurunan kesempatan kerja di Indonesia. Terdapat tiga (3) sektor yang mengalami peningkatan lapangan kerja yaitu sektor pertanian sebanyak 62. 644 orang, sektor industri kayu dan barang dari kayu 1. 265 orang dan pertambangan batubara, biji logam dan minyak bumi sebanyak 796 orang. Sedangkan sektor lainnya mengalami pengurangan kesempatan kerja sebanyak 253. 361 orang. Sektor yang mengalami pengurangan kesempatan kerja paling banyak adalah sektor perdagangan sebanyak 55. 563 orang, sektor pertanian tanaman pangan sebanyak 53. 302 orang dan sektor industri pemintalan, tekstil, pakaian, dan kulit sebanyak 49. 965 orang.⁶⁴

c) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kekuatan perdagangan China yang luar biasa mengkhawatirkan negara-negara ASEAN terutama Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena China memiliki produktivitas sangat tinggi, mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah dan variasi produk sangat banyak dari *hightech* (elektronik dan otomotif) maupun *lowtech* (produk tekstil dan kerajinan). Produsen China memiliki strategi pengembangan produk yang sederhana, yaitu meniru dan memperbaiki sehingga memangkas biaya riset dan pengembangan, serta

⁶⁴*Ibid.*, Hlm. 132-133.

kemampuan membuat produk dengan pilihan beragam kualitas untuk menjangkau semua segmen pasar.⁶⁵

Tantangan lain dari teknologi dan informasi bagi Indonesia, adalah gempuran produk-produk elektronik China, salah satunya adalah Huawei, vendor teknologi komunikasi asal China. Pasalnya dalam waktu 10 tahun, sejak masuk pertama kali tahun 2000, Huawei telah berhasil menduduki posisi tiga teratas dalam penyediaan telekomunikasi untuk para operator utama di Indonesia. Produk Huawei yang telah diaplikasikan di negeri ini antara lain GSM, UMTS, CDMA, WiMax, transmisi, datacom, fixes acces network, broadband acces network, core network, aplication & software, ataupun pengguna terminal.

Menurut Brand Manager Huawei Indonesia , Yunny Christiani Huawei telah membangun 10 kantor regional dan 17 pusat suku cadang regional untuk melayani seluruh nusantara. Dengan 1.200 orang pegawai yang 80 persen di antaranya adalah warga negara Indonesia, Huawei telah mendirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan (*research and developtment centre*) lokal di Jakarta yang berfokus pada pengembangan aplikasi software.⁶⁶

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 212-213.

d) Derasnya Arus Investasi China

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar. Banyak perusahaan baru bermunculan dan para investor asing mulai menanamkan modalnya dan meramaikan kompetisi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam negeri bersaing dengan rekannya dari negara lain. Demikian pula, dalam berbisnis di luar negeri pengusaha Indonesia dapat ikut serta mengambil bagian. Kalau di dalam negeri pengusaha Indonesia sukar bersaing dengan pengusaha asing, maka dalam perdagangan dengan negara lain akan lebih berat untuk pengusaha Indonesia.⁶⁷

China memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan perekonomiannya, bahkan perekonomian China dapat dilihat sebagai kekuatan ekonomi dengan skala satu benua bukan skala satu negara. Dewasa ini pertumbuhan ekonomi China begitu signifikan, yaitu dari hanya 3,1% pada 1980 menjadi 16% pada 2007, sehingga perekonomian China dewasa ini cukup berpengaruh di dunia.⁶⁸

Menurut BKPM perkembangan realisasi investasi China ke Indonesia sebelum dan sesudah ditandatanganinya ASEAN-China

⁶⁷ Ibid., 127-128

Free Trade Area (ACFTA) dapat dilihat dari realisasi investasi China ke Indonesia. Rata-rata jumlah investaasi yang masuk pada era pelaksanaan ACFTA sebanyak 17,75 proyek pertahun, hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah investasi sebelum pelaksanaan ACFTA yang rata-rata sebesar hanya sebesar 7,67 persen pertahun. Namun demikian, dari nilai investasi tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Rata-rata realisasi investasi Cina di Indonesia pada era ACFTA sebesar US\$ 35,17pertahun, tidak jauh berbeda dibanding sebelum pelaksanaan ACFTA yang besarnya US\$ 32,43. Demikian juga presentase investasi China ke Indonesia dibandingkan dengan total investasi dunia ke Indonesia masih kecil, sesudah perjanjian ACFTA hanya rata-rata 0,006 persen sedangkan sebelumnya juga rata-rata sebesar 0,006 persen.⁶⁹

Meskipun demikian, iklim investasi China telah membawa dampak besar pada kawasan ASEAN, khususnya bagi Indonesia. Hal tersebut membuat pasar domestik di Indonesia menjadi sangat tidak berimbang. Fenomena menarik tentang hal tersebut terjadi pada sektor non migas dan produksi barang olahan, dimana banyak label merk China telah bersaing dengan produk lokal maupun negara pemasok lainnya. Dan bahkan produk mainan anak buatan China juga telah menguasai

⁶⁹ http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/Ragimun_Analisis%20investasi%20China%20ke%20Indonesia%20di%20era%20pelaksanaan%20ACFTA.pdf, Terakhir diakses pada 2 Juli 2012

produksi mainan di pasar Indonesia.⁷⁰ Dalam tiga tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dengan China. Perbandingan neraca ekspor-impor non migas antara Indonesia dengan China selalu menunjukkan angka defisit. Data Bank Indonesia (Mei 2009) menyebutkan bahwa pada tahun 2006 Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 0,993 miliar. Pada tahun 2007 jumlahnya naik mencapai US\$ 2,708 miliar, bahkan pada tahun 2008 angka tersebut meningkat tajam mencapai US\$ 7,898 miliar. Selama tahun 2009 China menjadi negara pemasok barang barang impor nonmigas terbesar dengan nilai US\$ 12,01 miliar (BPS 2010).

Setelah mengetahui besar kecilnya potensi dari masing-masing kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dengan Jepang (IJEPA) dan China (ACFTA) sebagaimana tersebut dalam deskriptif di atas, maka penentuan alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini merujuk pada matriks SWOT, untuk selanjutnya berbagai potensi Indonesia terhadap forum kerjasama IJEPA dan ACFTA dalam matriks SWOT akan dirumuskan menjadi beberapa alternatif strategi yang kemudian akan diperbandingkan pada bab IV (empat). Adapun matriks SWOT Indonesia-Jepang (EPA) dan Indonesia China (FTA) adalah sebagai berikut :

⁷⁰ *Op Cit.*, Perjanjian Perdagangan. Hlm. 234-235.

Tabel. 5. Matriks SWOT EPA dan FTA

<i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)</i>	<i>Strenghts (S)</i> 1. SDA Melimpah dan SDM Murah 2. Pasar Potensial Bagi Produk-produk Jepang 3. Banyaknya UMKM	<i>Weaknesses (W)</i> 1. Rendahnya Kualitas SDM 2. Rendahnya Kualitas UMKM 3. Rendahnya kualitas Barang Ekspor 4. UU Investasi Berbelit
	<i>Opportunities (O)</i> 1. Penurunan Tarif BM 2. Peningkatan Akses Pasar 3. Pembukaan Lapangan Pekerjaan 4. Terbukanya Transfer Teknologi 5. Peningkatan Investasi Jepang	<i>Treats (T)</i> 1. Hambatan Non-Tarif Jepang 2. Liberalisasi Barang dan Jasa 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Besarnya Investasi Jepang
<i>ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i>	<i>Strenghts (S)</i> 1. SDA Melimpah dan SDM Murah 2. Pasar Potensial Bagi Produk-produk China 3. Banyaknya UMKM 4. <i>Market Saturation</i> (Jenuhnya Pasar China)	<i>Weaknesses (W)</i> 1. Mutu SDM Rendah 2. Mutu UMKM Rendah 3. Mutu Barang Ekspor Rendah 4. Ekspor Komoditas Primer 5. Implementasi UU Investasi Rumit
	<i>Opportunities (O)</i> 1. Penurunan Tarif BM 2. Terbukanya Akses Pasar 3. Pembukaan Lapangan Pekerjaan 4. Terbukanya Transfer Teknologi 5. Peningkatan Investasi China	<i>Treats (T)</i> 1. Hambatan Non-Tarif 2. Liberalisasi Barang dan Jasa 3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Derasnya Arus Investasi China